

KUALITAS UDARA**Pemerintah Siapkan Revisi Kebijakan**

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sedang menyiapkan revisi peraturan untuk memperbaiki kualitas udara, termasuk baku mutu udara ambien nasional. Selain itu, pemerintah berharap masyarakat berkontribusi dalam pengurangan pencemaran udara dengan mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan bermotor. Pengamatan kualitas udara Jakarta pada Juni terdapat 15 hari sehat karena kualitasnya baik, 10 hari sedang, dan 5 hari tidak ada data.

Hal itu disampaikan dalam jumpa pers dengan narasumber Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karliansyah serta Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Laksmi Wijayanti, Jumat (5/7/2019), di Jakarta.

"Pemerintah sudah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di mana dicantumkan revisi nilai Baku Mutu Udara

Ambien Nasional. Namun, belum bisa masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) sekarang," ujar Karliansyah.

Dalam usulan revisi standar baku mutu udara, parameter untuk PM 2,5 yang saat ini digunakan yaitu 65 mg/m^3 diturunkan menjadi 60 mg/m^3 , sementara standar WHO yaitu 25 mg/m^3 . Dengan standar nasional ini, dari 1 Januari 2019 hingga 30 Juni 2019, ada 15 hari sehat karena rata-rata harian PM 2,5 yaitu $31,49 \text{ mg/m}^3$.

"Jika dibandingkan baku mutu udara ambien nasional, kualitas udara Jakarta masih bagus atau sehat. Kalau dibandingkan dengan standar WHO, kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang," ujar Karliansyah.

Alat pengukur

Alat pengukur kualitas udara di Jakarta ada 5 buah. Setiap alat ukur efektif untuk mengukur radius 5 kilometer. Luas Kota Jakarta sekitar 660 km^2 .

Untuk mendapatkan angka baku mutu udara ambien, antara peralatan yang dipasang

KLHK di kawasan Gelora Bung Karno dan alat yang dipasang Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta butuh waktu untuk menyesuaikan karena metodologi pengukuran berbeda.

Karliansyah dan Laksmi mengatakan gembira dengan munculnya kesadaran masyarakat akan hak mendapatkan udara bersih. "Ini saat tepat untuk mempercepat dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat bagaimana kontribusinya untuk menurunkan sumber pencemaran udara," kata Laksmi. Sumber pencemaran udara untuk Kota Jakarta sekitar 60 persen dari kendaraan bermotor.

Untuk kontribusi masyarakat, kata Karliansyah, masyarakat sebaiknya meninggalkan premium dan menggunakan bahan bakar dengan standar Euro4.

Alfred Sitorus, aktivis koalisi pejalan kaki, meminta agar pemerintah membentuk sistem peringatan dini tentang kualitas udara sehingga masyarakat bisa menghindari terpapar udara yang tidak sehat. (ISW)

